

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal adalah sarana bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan menjual saham atau obligasi kepada investor. Di sisi lain, investor dapat memperoleh keuntungan melalui apresiasi nilai aset atau pembayaran bunga atau dividen. (Tandelilin, 2017:25). Pasar modal di Indonesia sendiri adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana BEI ini memiliki peran untuk menyediakan tempat jual beli modal perusahaan yang terdapat di Indonesia. Pada 25 Januari 2021, indeks BEI yang awalnya adalah Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) berubah menjadi Indonesia Stock Exchange – Industrial Classification (IDX-IC), tujuan perubahan tersebut yaitu untuk menciptakan basis investor yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor perekonomian.

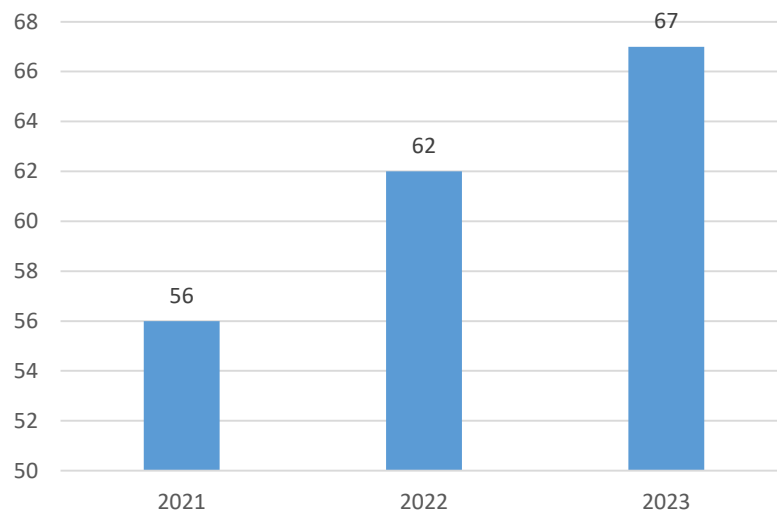
Tabel 1. 1 Daftar Sektor Pada IDX-C dengan Jumlah Perusahaan Terdaftar  
Pada Tahun 2023

Kode	Nama Sektor	Jumlah Perusahaan Terdaftar
A	<i>Energy</i>	83
B	<i>Basic Materials</i>	103
C	<i>Industrial</i>	63
D	<i>Consumer Non-Cyclicals</i>	125
E	<i>Consumer Cyclicals</i>	153
F	<i>Healthcare</i>	33
G	<i>Financials</i>	105
H	<i>Properties &amp; Real Estate</i>	93
I	<i>Technology</i>	44
J	<i>Infrastructure</i>	67
K	<i>Transportation &amp; Logistic</i>	37

*Sumber : Bursa Efek Indonesia, Diolah Penulis (2024)*

Sektor infrastruktur merupakan bagian perekonomian yang terdiri dari fasilitas fisik yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Infrastruktur mencakup berbagai fasilitas seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air, dan komunikasi. Fungsi utama sektor ini adalah memperlancar akses dan pergerakan orang dan barang serta menyediakan pelayanan penting bagi kehidupan sehari-hari. Infrastruktur yang baik

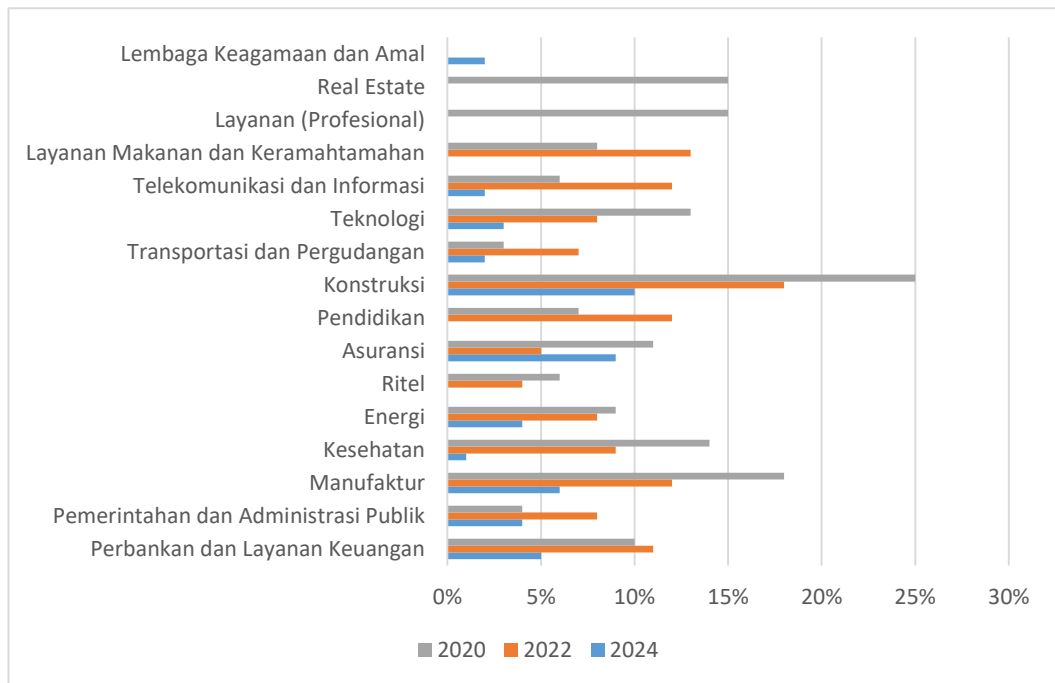
memungkinkan suatu negara menjadi lebih produktif, efisien, dan kompetitif baik di tingkat domestik maupun internasional. Sektor infrastruktur ditambahkan bersamaan dengan sektor-sektor lainnya dalam indeks IDX-IC yaitu pada 25 Januari 2021 berdasarkan surat edaran BEI No.: Peng-00007/BEI.POP/01-2021.



Gambar 1. 1 Daftar Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023

*Sumber : Bursa Efek Indonesia, Data Diolah Penulis (2024)*

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan sektor infrastruktur yang telah listing di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun peningkatan tersebut tidak signifikan. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 56 perusahaan, kemudian meningkat sebanyak 6 perusahaan di 2022 menjadi 62 perusahaan, setelah itu meningkat kembali pada tahun 2023 sebanyak 5 perusahaan sehingga total perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI sebanyak 67 perusahaan



Gambar 1. 2 Persentase Per-Sektor Usaha Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan

Sumber : Survey ACFE Internasional (2020-2024)

Berdasarkan laporan ACFE 2020,2022 dan 2024 diketahui bahwa sektor infrastruktur atau konstruksi menjadi sektor tertinggi persentasenya dalam melakukan *fraud* dengan jenis kecurangan laporan keuangan. Meskipun jumlah kasus terbanyak terdapat pada sektor perbankan dan layanan keuangan dengan jumlah jenis kasus *fraud* keseluruhan sejumlah 364 kasus, dibanding sektor konstruksi sejumlah 77 kasus untuk tahun 2020 tetapi persentase kecurangan laporan keuangan pada sektor infrastruktur sebesar 25%, dibandingkan sektor perbankan dan layanan keuangan sebesar 10%. Kemudian pada tahun 2022, jumlah kasus *fraud* keseluruhan terbanyak tetap pada sektor perbankan dan keuangan sebanyak 351 kasus dan sektor infrastruktur sebanyak 78 kasus, tetapi persentase kasus terjadinya kecurangan laporan keuangan pada sektor perbankan dan keuangan sebesar 11% sedangkan sektor infrastruktur sebesar 18%. Pada 2024 kasus terbanyak juga tetap dari sektor perbankan dan keuangan sebanyak 305 kasus, sedangkan sektor infrastruktur sebanyak 73 kasus, tetapi tetap persentase

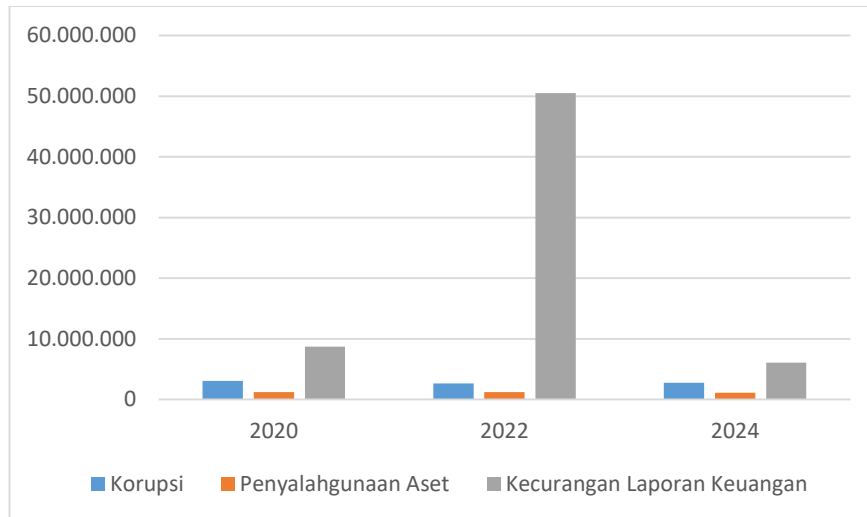
kecurangan laporan keuangan tertinggi terdapat pada sektor infrastruktur sebesar 10% sementara sektor perbankan dan keuangan sebesar 5%. Oleh karena itu, berdasarkan laporan di atas, kecurangan laporan keuangan merupakan jenis *fraud* dengan dampak kerugian terbesar dan sektor infrastruktur merupakan sektor yang melakukan persentase fraud terbesar setiap laporan tahunnya.

## **1.2 Latar Belakang**

Berdasarkan teori keagenan menurut Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. (1976) menjelaskan bahwa pemilik perusahaan sebagai prinsipal, memberikan tanggung jawab untuk mengurus perusahaannya kepada manajemen sebagai agen. Tetapi, dalam menjalankan tugasnya manajemen tidak selalu bekerja sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, sehingga dapat terjadi masalah perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Laporan keuangan menurut Budiman, R. (2020) adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu, berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan secara tepat dan dalam periode akuntansi tertentu sehingga informasi yang ada di dalamnya relevan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Sehingga dalam konteks pengambilan keputusan, laporan keuangan berfungsi sebagai dokumen yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan, yang sangat penting untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusan investasi (Nur Kholis, P. A. 2022). Oleh karena itu, agen dapat memilih informasi mana yang dapat ditampilkan dalam laporan keuangan. Tetapi hal tersebut menjadi kesempatan dari manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan, dengan melebih-lebihka ataupun mengurangi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga dapat berimbas merugikan pihak-pihak lain dalam perusahaan (Suryani, E., & Fajri, R. R. 2022).

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk kecurangan yang paling umum dalam dunia kerja. Berdasarkan laporan "*Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*" tahun 2020, kecurangan laporan keuangan mencakup berbagai bentuk penipuan, termasuk penipuan pengeluaran, penipuan

pendapatan, dan penipuan aset. Kecurangan ini sering kali dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang buruk.



Gambar 1. 3 Rata-Rata Kerugian Tahunan yang Disebabkan Oleh Tiap Jenis *Fraud*

*Sumber : Survey ACFE Internasional (2020-2024)*

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* internasional pada tahun 2020, 2022 dan 2024 diketahui bahwa kecurangan laporan keuangan memiliki dampak kerugian terbesar pada perusahaan. Pada tahun 2020 kasus kecurangan laporan keuangan hanya sejumlah 186 jumlah kasus jika dibandingkan korupsi dan penyalahgunaan aset sebanyak, 789 dan 1.639 kasus. Tetapi dampak kerugian akibat tindakan tersebut paling banyak disebabkan oleh kecurangan laporan keuangan sebesar \$8.639.000 dibandingkan korupsi dan penyalahgunaan aset yang masing masing sebesar \$3.039.000 dan \$1.199.000. Kemudian pada tahun 2022, jumlah kasus pada kecurangan laporan keuangan sebanyak 150 kasus sementara pada korupsi dan penyalahgunaan aset masing masing sebanyak 906 dan 1.605 kasus. Namun, kerugian pada tahun 2022 untuk kecurangan laporan keuangan sebesar \$50.482.000 kemudian rata rata kerugian pada kasus korupsi dan penyalahgunaan aset sebesar \$2.647.000 dan \$1.203.000. Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah kasus pada kecurangan laporan keuangan sebanyak 61 kasus sementara pada korupsi dan penyalahgunaan aset masing masing sebanyak 662 dan 1.309 kasus. Namun, rata-

rata kerugian pada tahun 2024 untuk kecurangan laporan keuangan sebesar \$6.045.000 kemudian rata rata kerugian pada kasus korupsi dan penyalahgunaan aset sebesar \$2.738.000 dan \$1.116.000.

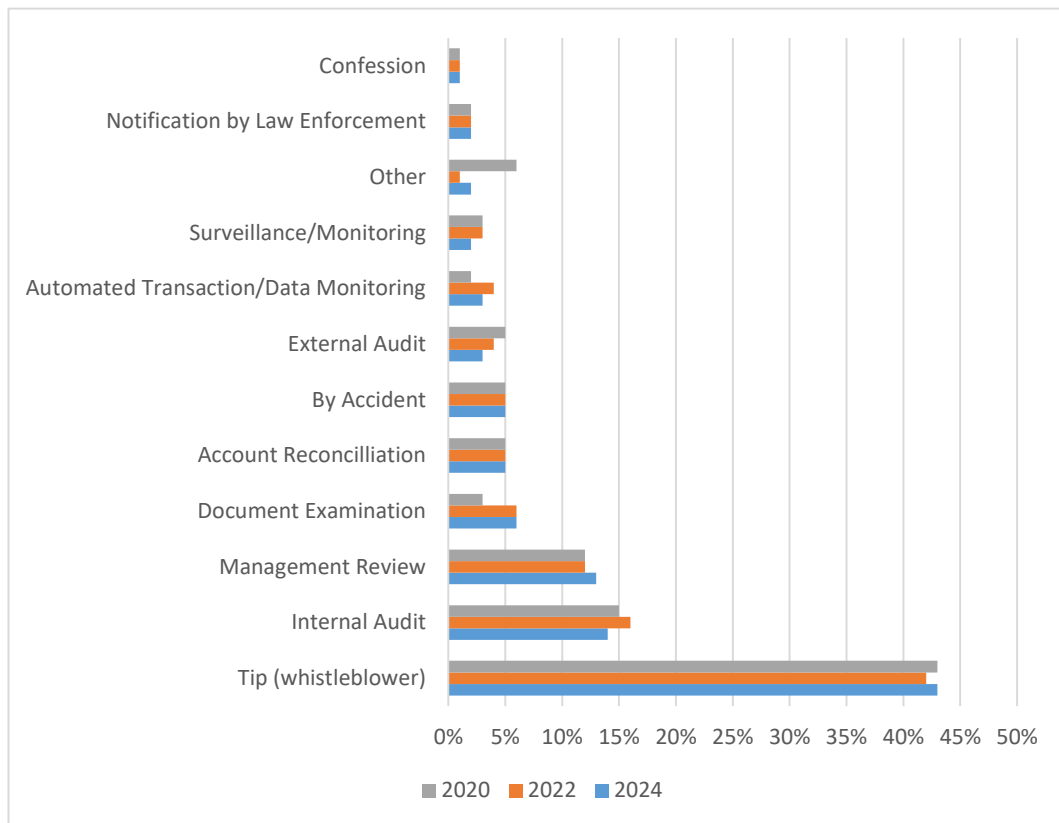
Adapun kasus terkait yang berupa indikasi kecurangan laporan keuangan yang terdapat di Indonesia. Dilansir pada [www. money.kompas.com](http://www.money.kompas.com). (2023), pada perusahaan PT Waskita Karya yang dicurigai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena adanya indikasi rekayasa laporan keuangan yang telah dilakukan sejak tahun lama. Pihak tersebut menyebut bahwa indikasi ini dikarenakan laporan keuangannya dianggap tidak wajar sejak tahun 2016, hal tersebut dikarenakan *cashflow* yang dianggap tidak wajar (bernilai negatif) dari tahun 2016 sampai 2017 tetapi perusahaan masih dapat membukukan laba yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut bahwa perseroan melakukan pemolesan pada laporan keuangannya untuk menutupi kesulitan keuangannya. Kemudian, Kementerian BUMN meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi lebih lanjut terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kedua BUMN tersebut pada tahun 2021. Kemudian dilansir pada [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id). (2023), hal ini diperkuat dengan KAP yang mengaudit laporan keuangan milik waskita karya pada tahun 2021 yaitu Kosasih, Nurdiyaman, Multadi, Tjahjo & Rekan, yang juga anggota dari Crowe Horwath International dicabut tanda izin terdaftarnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu menurut [www.tempo.com](http://www.tempo.com). (2023) terungkap juga tindakan pemalsuan dokumen *Supply Chain Financing* (SCF) pada tahun 2022 yang dilakukan oleh mantan jajaran direksi waskita Destiawan, Haris Gunawan dan Bambang Rianto hal tersebut dimaksudkan untuk pembayaran utang-utang Waskita Karya, padahal utang tersebut digunakan dalam proyek fiktif sesuai dengan keinginan tersangka. Pada tahun 2023, BPKP telah menyelesaikan proses auditnya dan terah diserahkan hasilnya kepada Kementerian BUMN.

Kasus selanjutnya terdapat pada PT Wijaya Karya (WIKA) yang terdapat indikasi bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melakukan manipulasi laporan keuangan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencurigai bahwa pelaporan keuangan WIKA tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Berdasarkan

berita dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com). (2023), meskipun dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, cash flow-nya sebenarnya tidak pernah positif. Kementerian BUMN bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan investigasi terkait hal ini (kasusnya sama seperti Waskita Karya, terdapat juga pada laporan website [katadata.co.id](http://katadata.co.id). (2023) yang menjelaskan bahwa WIKA pada tahun 2016 cash flow bagian operasional dan investasi negatif tapi masih tetap menghasilkan laba yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69%, kemudian pada tahun 2017 arus kas investasinya masih negatif namun masih tetap menghasilkan laba meskipun kenaikannya dibanding tahun sebelumnya tidak begitu signifikan). Hal tersebutlah yang menjadi perhatian oleh lembaga BPKP dan Kementerian BUMN dikarenakan kas dan setara kas yang diperoleh terkadang meningkat dan menurun namun laba bersihnya tetap mengalami peningkatan hingga tahun 2020.

Berdasarkan kasus yang terdapat pada PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya yang memperlihatkan bahwa masih adanya laporan kecurangan yang dimanipulasi informasinya, dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada perusahaan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pemangku kepentingan yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu contoh dampaknya yaitu, jika investor perusahaan tersebut akan melakukan pengambilan keputusan pemberian modal maka keputusan tersebut tidak berdasar informasi kondisi perusahaan sebenarnya perusahaan akibat adanya manipulasi tersebut (Siswanto, D. A, 2022). Berdasarkan jurnal rujukan sebelumnya, masih terdapat banyak pembahasan mengenai kecurangan laporan keuangan yang berlangsung sampai sekarang. Adapun beberapa variabel predictor yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi, dan koneksi politik.

Salah satu faktor terungkapnya kecurangan laporan keuangan adalah adanya *whistleblowing system* yang efektif, sehingga dengan adanya sistem pelaporan yang efektif tersebut maka jika terdapat kecurangan dalam perusahaan dapat diberikan sanksi yang sesuai kepada pelakunya (Melania Malewa et al., 2023)



Gambar 1. 4 Pendeteksian Awal Kecurangan  
 Sumber : Survey ACFE Internasional (2020-2024)

Berdasarkan Gambar 1.4 diketahui bahwa “*tip*” sebagai *whistleblower* (pelapor) menjadi faktor paling tinggi untuk melaporkan adanya tindakan kecurangan dalam perusahaan, sehingga untuk meningkatkan efektivitas whistleblower tersebut maka diperlukan adanya *whistleblowing system* yang baik. *Whistleblowing system* yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang tepat dapat berdampak negatif pada budaya perusahaan. Tanpa sanksi yang jelas dan efektif, *whistleblowing system* dapat dianggap sebagai upaya untuk menyalahkan orang lain atau sebagai cara untuk menyelesaikan masalah internal perusahaan (Krügel, S. & Uhl, M., 2023). Sejalan dengan teori keagenan, maka diperlukan pengawasan internal seperti sistem pelaporan untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan



yang dilakukan oleh pihak agen (Mardiana, Ana et al., 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shonhadji, N. dan Maulidi, A (2021) memberikan hasil yaitu *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aviantara, R. (2021) dan Girau, E. A. et al., (2024) memberikan hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan tidak adanya pengaruh antara *whistleblowing system* terhadap kecurangan laporan keuangan (Lestari, A. A., & Widiyati, D, 2023).

Keahlian keuangan komite audit merupakan komite audit yang memiliki anggota dengan keahlian keuangan yang baik dapat membantu dalam mencegah pelaporan keuangan yang tidak jujur. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 juga mengatur bahwa komite audit harus mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan keahlian ini, anggota komite audit dapat dengan lebih baik memahami dan mengontrol laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko pelaporan keuangan yang tidak jujur (Ehigie, A. H. 2022). Terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasir, N.A.B.M et al. (2019); Girau, E. A. et al. (2024); Mousavi, M. et al. (2022), memberikan hasil yaitu keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara terdapat penelitian sebelumnya yang memberikan pernyataan bahwa keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (Ogoun, S., & Perelayefa, O. G. 2019; Trisanti, T. 2023).

Pembayaran remunerasi yang tinggi dapat memotivasi direksi untuk lebih berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan, tetapi pada saat yang sama, dapat meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara motivasi dan risiko dalam menetapkan remunerasi bagi direksi dikarenakan remunerasi direksi perlu dirancang dengan hati-hati untuk menghindari potensi insentif yang dapat mendorong direktur untuk terlibat dalam kecurangan. Pembayaran remunerasi ini

bertujuan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik untuk mengisi posisi direksi, serta memotivasi mereka untuk mencapai kinerja yang optimal (Alkebbe Radwan et al., 2021). Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat hasil bahwa remunerasi direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Nasir, N.A.B.M et al., 2019; Seifzadeh, M. et al., 2022; A. Girau, E. et al., 2022; Girau, E. A. et al. 2024). Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Rostami, V. & Rezaei, L. (2022) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara remunerasi direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.

Koneksi politik adalah ketika ada hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang terlibat dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak, seperti memberi perusahaan perlakuan khusus (Ishak, A. C., & Asalam, A. g., 2023). Menurut Watts, R.L., & Zimmerman, J.L. (1978) dalam teori *political cost hypothesis*, biaya politis dapat memicu adanya relasi politik antar dewan manajemen perusahaan dengan pihak pemerintah akibat adanya aliran dana dari pemerintah, sehingga manajemen memperoleh manfaat politis akibat adanya relasi politik tersebut. Terdapat manfaat koneksi politik bagi perusahaan dalam hal investasi, seperti dengan adanya relasi dengan pemerintah maka perusahaan dapat dengan mudah menerima proyek pemerintah yang memiliki keuntungan besar bagi perusahaan tersebut (Pan, X., & Tian, G. G., 2020). Terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dengan kecurangan laporan keuangan (Wang, Y. et al., 2024; Maulidi, A. 2023; Nadzilyah, H., & Primasari, N. S. 2022). Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kim, D.S & Lee, S.H. (2023) memberikan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Tetapi terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Daresta, T., & Suryani, E. (2022) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Setelah penjelasan fenomena sebelumnya kemudian dengan masih adanya inkonsistensi pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pembahasan topik penelitian, dengan beberapa variabel independen yang telah ditentukan oleh penulis. Maka, penulis melakukan penelitian ini dengan judul

**“Pengaruh *Whistleblowing System*, Keahlian Keuangan Komite Audit, Remunerasi Direksi dan Koneksi Politik Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”**

**1.3 Rumusan Masalah**

Apabila terjadi manipulasi atau kecurangan dalam pelaporan keuangan, keputusan yang diambil berdasarkan laporan tersebut tidak akan tepat karena informasi yang awalnya relevan telah diubah, sehingga yang dilaporkan menjadi sesuai dengan keinginan pembuat laporan keuangan daripada informasi yang sebenarnya. Hal ini berdampak baik itu pada pihak eksternal maupun internal. Pihak eksternal seperti kreditor akan salah mengira perusahaan dapat membayar hutang yang diberikan, dan pemegang saham akan tetap memiliki saham perusahaan atau menambahnya meskipun keadaan perusahaan buruk. Kecurangan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang buruk, dan manajemen dicurigai melakukan penyelewangan wewenang saat menjalankan bisnis

Budaya perusahaan dapat dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang tidak memiliki sanksi yang tepat. Jika tidak ada sanksi yang jelas dan efektif, sistem *whistleblowing* dapat dianggap sebagai upaya untuk menyalahkan orang lain atau sebagai cara untuk menyelesaikan masalah internal perusahaan. Akibatnya, kepercayaan karyawan dapat berkurang dan sistem mungkin gagal mendeteksi dan mengatasi pelanggaran. Komite audit harus memiliki minimal satu anggota yang mahir dalam akuntansi dan keuangan. Meskipun pembayaran yang tinggi diharapkan dapat menarik dan mempertahankan bakat terbaik untuk posisi direksi, pembayaran yang tinggi juga dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Jika dewan direksi atau komisaris perusahaan memiliki hubungan politik, mereka memiliki manfaat koneksi politik dalam hal investasi karena mereka dapat dengan mudah menerima proyek pemerintah.

Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini dimaksudkan untuk mencari apakah terdapat pengaruh dari *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan

sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Sehingga, berikut adalah rumusan pertanyaan dalam penelitian ini yang telah disesuaikan dengan konsep dalam latar belakang yang telah dijelaskan :

1. Bagaimana *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi, koneksi politik dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
2. Apakah *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah *whistleblowing system* secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
4. Apakah keahlian keuangan komite audit secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
5. Apakah remunerasi direksi secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
6. Apakah koneksi politik secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi, koneksi politik dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *whistleblowing system* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
5. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh remunerasi direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
6. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan serta pengetahuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang bagaimana pengaruh *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan. Sehingga penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain untuk menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan di penelitian selanjutnya dengan topik penelitian kecurangan laporan keuangan.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Pada aspek aspek praktis terdapat manfaat penelitian bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan antara lain :

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk menentukan bagaimana tindakan yang akan diambil apabila terdapat indikasi

kecurangan dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan informasinya dapat digunakan dengan baik.

2. Bagi pemegang saham, penelitian ini diharapkan menjadi bacaan yang baik agar dapat mengantisipasi perusahaan yang dicurigai melakukan manipulasi laporan keuangan. Sehingga, pemegang saham tersebut dapat mengambil keputusan apakah tetap menginvestasikan dananya dalam perusahaan tersebut atau tidak.
3. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bacaan jika suatu industri bisnis terduga atau bahkan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan. Sehingga, dapat dibuatlah kebijakan atau keputusan yang tepat terhadap kasus atau fenomena tersebut.

#### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir dalam penelitian disusun peneliti sebagai berikut :

##### **a. BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini menjelaskan secara umum dan lengkap pada penelitian ini yang meliputi gambaran umum objek penelitian pada sektor infrastruktur, latar belakang topik penelitian ini yaitu kecurangan laporan keuangan kemudian fenomena penelitian hingga inkonsistensi variabel penelitian yaitu *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi dan koneksi politik. Kemudian perumusan masalah yang terdapat pertanyaan penelitian, pembuatan tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga perumusan sistematika penulisan tugas akhir.

##### **b. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini dan teori pendukung lainnya sesuai dengan variabel yang ditentukan yaitu *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi, koneksi politik dan kecurangan laporan keuangan. Selain teori pendukung, pada bab ini juga menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar pemilihan variabel pada penelitian

ini, selanjutnya pembuatan kerangka penelitian berdasarkan dari tinjauan pustaka yang telah digunakan hingga pembuatan hipotesis penelitian.

**c. BAB 3 METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembuatan tabel operasionalisasi variabel independen maupun dependen, serta tahapan yang dilakukan saat penelitian. Bab ini juga menjelaskan populasi penelitian yaitu beberapa perusahaan dalam kelompok sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2021-2023, kemudian penentuan hasil sampling perusahaan sektor infrastruktur setelah eliminasi berdasarkan kriteria sampling yang telah ditentukan. Bab ini juga menjelaskan mengenai metode dan teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, dengan metode analisis yaitu menggunakan regresi logistik data panel karena data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu data *cross section* dan data *time series*.

**d. BAB 4 PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan penjelasan terkait hasil analisis data serta membahas hasil pengujian hipotesis *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi dan koneksi politik berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan baik secara simultan maupun secara parsial.

**e. BAB 5 KESIMPULAN**

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian pada variabel independen yaitu *whistleblowing system*, keahlian keuangan komite audit, remunerasi direksi dan koneksi politik dan variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan. Kemudian, terdapat uraian mengenai saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.